



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUGROHO**
2. Jabatan : **STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK**
3. NHK : **274051**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 361.992.000**

1. Tanah Seluas 1755 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 175.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/150 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 36.492.000
3. Tanah Seluas 182 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 50.000.000
4. Tanah Seluas 836 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 318.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, WARISAN Rp. 11.500.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA RUSH JEEP/MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
4. MOBIL, KIARIO MINIBUS Tahun 2012, WARISAN Rp. 100.000.000
5. MOBIL, DAIHATSU TAFT MINIBUS Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 63.000.000
6. MOTOR, YAMAHA RX 100 Tahun 1977, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 83.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	38.449.506
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	801.441.506
III. HUTANG	Rp.	90.489.760
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	710.951.746

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.